



IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL COMMITTEE (ICC) IN EARLY FRAUD PREVENTION EFFORTS

(Case Study of PT Perkebunan Nusantara XIII)

Najwa Nismara ^{1*}, Endang Kusmana ², Nurmalia ³

Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: najwanismaraa@gmail.com

Abstract

Purpose – This research was conducted with the aim of knowing the application of the internal control system in the company in detecting fraud in operational activities and wanting to know the company's understanding of the concept of fraud and how to prevent it. This research is useful to see how strong the internal control system is in the company.

Method – The research method that will be used is a descriptive qualitative research method in the form of a case study at PT Perkebunan Nusantara XIII. The research is descriptive qualitative research that uses three data collection methods, namely, interviews, observation, and documentation.

Result – The results show that the company already has an understanding of the concept of fraud itself and already has prevention so that these actions do not occur. The control system in the company also runs well and forms a strong internal control system.

Implication – Based on the results of the research that the researchers have done, the following conclusions can be drawn: Understanding the concept of fraud and how to prevent it is well known by the company, the company's internal control has been implemented properly so as to form a strong control component.

Keywords: Internal Control System; Fraud; Prevention; Exposure.



PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sempat memburuk karena adanya pandemi *Covid-19* yang melanda semenjak tahun 2020, banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat tidak stabilnya perekonomian yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah pandemi *Covid-19* mulai berkurang pada tahun 2022, sekarang Indonesia sedang dalam upaya pemulihan ekonomi negara, dan banyak perusahaan dari berbagai sektor juga berusaha bangkit dari krisis ekonomi yang selama ini mereka hadapi. Jika tindakan ini tidak diawasi dengan baik maka akan terjadi beberapa tindakan yang malah kedepannya akan merugikan perusahaan seperti, melakukan kecurangan (*fraud*), tindakan korupsi, penyalahgunaan aset perusahaan, pemalsuan laporan keuangan dan lain sebagainya. Sehingga setiap perusahaan harus lebih tegas dan teliti dalam melakukan pengawasan kegiatan operasional yang sedang terjadi dalam perusahaan.

Setiap perusahaan harus memiliki sistem pengendalian yang baik agar kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika suatu perusahaan memiliki sistem pengendalian yang buruk maka akan meningkatkan risiko terhadap tindakan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Seperti salah satunya yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara XIII. Telah terjadi tindakan korupsi pada pekerjaan penanaman kelapa sawit di kebun inti Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2014 pada PT Perkebunan Nusantara XIII yang diungkapkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tahun 2021. Kasus korupsi ini melibatkan 5 (lima) oknum yaitu, mantan General Manajer Distrik Kalimantan Barat II, PTPN XIII, karyawan BUMN PTPN XIII, Direktur CV SIDI-SIDI, karyawan BUMN, dan Ibu Rumah Tangga, korupsi ini terjadi karena para oknum menandatangani dokumen untuk pencairan pembayaran kegiatan penanaman berupa Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan tidak sesuai realisasi sebenarnya serta melakukan penutupan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Penutupan pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 dilaporkan penanaman sudah selesai dikerjakan seluas 1.150 ha (100%) padahal pekerjaan penanaman belum selesai dikerjakan 100% yakni yang belum ditanam seluas 300,70501 ha dan yang sudah ditanam 849,29 ha. Hal ini terjadi karena oknum kejahatan tersebut mengabaikan sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan dan hal ini memungkinkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada sekarang juga akan mengalami *fraud*.

Selain fenomena tersebut, penelitian ini juga diperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Isa Alamsyahbana dkk pada tahun 2022, dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan SPI Dan Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pendektasian Fraud Secara Dini penelitian ini mengangkat fenomena kasus kecurangan yang terjadi pada PT Asuransi Central Asia Cabang Batam. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan fenomena tersebut sebagai landasan dalam penelitian. Penelitian dilakukan untuk melihat penerapan dari sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan yang dirasa pengendalian internal ini sangatlah penting dalam mencegah serta mendeteksi adanya tindakan kecurangan.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara XIII. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu, wawancara yang akan dilakukan bersama salah satu staf Bagian Satuan Internal Perusahaan, observasi dilakukan di lingkungan Perusahaan dan dokumentasi.

Variabel Penelitian

Unsur-Unsur Pengendalian Internal tersebut menurut Warren, Reeve, & Fees (1999, p184) adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian.

b. Penilaian resiko

Manajemen harus memperhitungkan resiko ini dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya sehingga tujuan dari pengendalian internal dapat dicapai.

c. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan.

d. Pemantauan atau monitoring

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi di mana letak kelemahannya dan memperbaiki efektifitas pengendalian tersebut.

e. Informasi dan komunikasi

Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku.

Teknik Analisis

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu staf Bagian SPI, pertanyaan yang di ajukan dalam wawancara memuat 5 variabel yang ada dalam COSO, maka hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. PTPN XIII memiliki kebijakan/ *Standard Operating Procedure* (K/SOP) tentang aturan perilaku yang telah di atur dalam pedoman etika bisnis dan etika kerja sebagaimana yang termuat dalam pedoman manual GCG perusahaan. Perusahaan juga sudah mengomunikasikannya kepada seluruh pegawai terkait kebijakan tersebut. Selain itu perusahaan juga memiliki dokumen pengenaan sanksi disiplin yang tepat terhadap pelanggaran aturan perilaku, dan telah menerapkan pengenaan sanksi disiplin terhadap oknum karyawan yang melakukan pelanggaran terkait perilaku sesuai ketentuan yang di atur dalam pedoman etika bisnis dan etika kerja. Perusahaan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen *code of conduct* yang telah di tanda tangani oleh seluruh pegawai. PTPN XIII memiliki aplikasi program aplikasi *whistleblower system*, yang dapat diakses webside resmi perusahaan dan telah di atur dalam pedoman penanganan pengaduan pelanggaran atau *whistleblower system* sebagaimana terdapat di dalam pedoman manual GCG perusahaan.
 - b. PTPN XIII memiliki dokumen kebijakan yang mengatur standar kompetensi jabatan seluruh karyawan sebagaimana di tetapkan dalam *Job Description*. Hal tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh posisi jabatan yang ada di perusahaan. Perusahaan memiliki dokumen atas pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi teknis/ manajerial pegawai dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, sesuai dengan kebijakan/ prosedur yang berlaku hal tersebut di atur dalam pedoman tata Kelola perusahaan pada pasal 26 mengenai Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM). Perusahaan memiliki prosedur tentang standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan yang tercantum dalam *Job Description* dan memiliki database kompetensi pegawai sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan penempatan/ penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan .
 - c. Perusahaan memiliki dokumen struktur organisasi dan tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen tersebut sudah di atur dalam surat keputusan direksi PT Perkebunan Nusantara XIII, nomor : 13.00/01/KPTS/08A/I/2020, tentang perubahan dan penetapan *Job Description* bagian kantor direksi. Perusahaan juga memiliki dokumen sosialisasi mengenai struktur organisasi beserta tata laksananya kepada seluruh level pimpinan unit entitas dan pegawai yang berkepentingan. PTPN XIII memiliki dokumen kebijakan/ prosedur yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam entitas. Perusahaan memiliki aplikasi yang berfungsi sebagai

pengaturan tugas untuk setiap level karyawannya serta dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan penilaian kinerja.

- d. PTPN XIII memiliki satuan pengawasan intern, SPI PTPN XIII juga telah memiliki piagam audit/ internal audit charter dan telah di sahkan oleh direktur serta komisaris perusahaan. Piagam tersebut sudah di komunikasikan dalam lingkup internal SPI serta dibahas Bersama direktur, komisaris dan komite audit. Dalam melakukan pengawasan menghasilkan laporan hasil audit intern, dan memiliki surat atensi dari inspektorat/itjen kepada pimpinan unit organisasi/ unit kerja, serta memiliki bukti tindak lanjut terhadap surat atensi dari inspektorat/itjen.

2. Penilaian Risiko

- a. PTPN XIII memiliki pedoman penilaian risiko yaitu pedoman manajemen risiko berbasis ISO 31000, pedoman tersebut termasuk pengaturan penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan. Pedoman tersebut juga telah di komunikasikan kepada seluruh karyawan pimpinan serta dilakukan monitoring risiko setiap triwulan. Selain itu perusahaan juga memiliki dokumen berupa daftar risiko atas kegiatan utama dan juga melakukan evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko/kebijakan penilaian risiko dan daftar risiko. PTPN XIII memiliki aplikasi terkait pengelolaan unit resiko kerja yaitu aplikasi Simako.
- b. Perusahaan memiliki pedoman penilaian risiko (analisis risiko) termasuk pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan. Hal tersebut juga sudah di komunikasikan kepada seluruh pegawai dan memiliki bukti bahwa hal tersebut sudah di komunikasikan. Adanya rencana tindak pengendalian (RTP)/ rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan perusahaan. Kebijakan tersebut juga telah di evaluasikan tidak hanya itu guna memantau pemuktahiran RTP/ rencana penanganan risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan *stakeholders* perusahaan memiliki aplikasi tersendiri untuk memantaunya.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Perusahaan memiliki dokumen penetapan kinerja unit kerja tahunan dan triwulan. Hal tersebut juga selalu di laporkan, laporan kinerja tersebut mengukur pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK/Tapkin, selain itu ada juga laporan evaluasi sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi atas kinerja. Perusahaan memiliki program aplikasi computer guna memantau pelaksanaan kinerja unit kerja.
- b. Perusahaan memiliki SOP untuk melakukan dokumentasi atas penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting. SOP tersebut juga sudah di komunikasikan dan terdapat bukti penerapan atas SOP tersebut. Perusahaan melakukan evaluasi berkala dan hal tersebut telah terdokumentasikan, untuk

memantau pelaksanaan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting perusahaan memiliki program aplikasi untuk memantaunya.

4. Informasi dan Komunikasi

- a. Spesifikasi kebutuhan informasi SPI sudah ditetapkan secara formal. PTPN XIII sudah mengomunikasikan hal tersebut kepada para pegawai yang berkepentingan. Adanya mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci dan sesuai untuk semua tingkatan pimpinan. Sudah menggunakan sistem informasi operasional dan keuangan yang dapat mendukung program dan kegiatan, program tersebut juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan memiliki notulen, pakta integritas, pencahangan arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern. Tanggungjawab pengendalian intern tersebut juga memiliki kebijakan yang telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang berkepentingan. Adanya pimpinan organisasi yang menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi, baik untuk internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personal pelaksana kegiatan. Pimpinan organisasi tersebut juga melakukan evaluasi atas kebijakan/SOP secara berkala dan terdokumentasi. Adanya tindak lanjut hasil pengawasan, forum pemuktahiran data.

5. Pemantauan

Perusahaan memiliki kebijakan/SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit. Perusahaan juga melakukan kegiatan sosialisasi dan media untuk komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak lanjut temuan audit juga melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah dengan melibatkan manajemen dan pegawai terkait yang berkompeten. Perusahaan juga selalu melakukan konsultasi dengan BPK yang akan membantu dalam proses penyelesaian audit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai konsep kecurangan dan cara pencegahannya sudah diketahui dengan baik oleh pihak perusahaan, dilihat dari pengalaman yang telah terjadi membuat perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menutup berbagai macam faktor yang bisa menimbulkan terjadinya kecurangan, dengan melakukan evaluasi kepada para pegawai dan mensosialisasikan kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan membuat para pegawai mengetahui dengan baik batasan yang mereka miliki.
2. Pengendalian internal perusahaan sudah diterapkan dengan baik sehingga membentuk komponen pengendalian yang kuat. Sehingga evaluasi dan



pemantauan harus terus dilakukan agar pengendalian tetap terjaga dan jika terdeteksi tindak kecurangan bisa segera di Atasi.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kualitas pegawai perusahaan bisa memberikan penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi agar mereka selalu semangat dan memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.
2. Melakuakn sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan perusahaan agar mereka selalu ingat mengenai aturan yang berlaku di perusahaan.

REFERENSI

Akidna Rahma. (2021, October 27). Fraud Triangle: Temukan Kecurangan Keuangan Pada Bisnis. Retrieved August 30, 2023, from Majoo.id website: <https://majoo.id/solusi/detail/fraud-triangle>

Are there Different Types of Internal Controls? | Office of Internal Audit. (2023). Retrieved August 30, 2023, from Vumc.org website: <https://www.vumc.org/vumcinternalaudit/are-there-different-types-internal-controls>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). Fungsi Pengendalian Internal Bagi Suatu Organisasi. Retrieved August 30, 2023, from Kemenkeu.go.id website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun/baca-artikel/15723/Fungsi-Pengendalian-Internal-Bagi-Suatu-Organisasi.html>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). Fungsi Pengendalian Internal Bagi Suatu Organisasi. Retrieved August 30, 2023, from Kemenkeu.go.id website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun/baca-artikel/15723/Fungsi-Pengendalian-Internal-Bagi-Suatu-Organisasi.html>

Fraud Adalah: Definisi, Faktor, Jenis, dan Cara Pencegahannya - BFI. (2023). Retrieved August 30, 2023, from Bfi.co.id website: <https://www.bfi.co.id/id/blog/fraud-adalah-salah-satu-tindakan-kriminal#:~:text=Sedangkan%20pengertian%20ofraud%20menurut%20the,yang%20keliru%20terhadap%20pihak%20lain.>



Karlina Ghazalah Rahman. (2020). *SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN*. 3(1), 20-27.
<https://doi.org/10.37888/bjra.v3i1.207>

Meravi. (2020, August 28). *Unsur-Unsur Pengendalian Internal - Meravi.id*. Meravi.id.
<https://meravi.id/unsur-unsur-pengendalian-internal/>

Muhammad Isa Alamsyahbana, Budi Zulfachri, Navtra Zulaika, Andres Putranta Sitepu, & Munaf, T. (2022). *Analisis Penerapan SPI Dan Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Secara Dini*. 8(2), 1343-1343.
<https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.1343-1356.2022>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2023). Kemenkeu.go.id.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/6otahun2008pp.htm#:~:text=Sistem%20Pengendalian%20Intern%20adalah%20proses,pelaporan%20keuangan%2C%20pengamanan%20aset%20negara%2C>

Ricky. (2021, September 13). *Pengertian Pengendalian Internal: Jenis, Tujuan, Komponen, dan Unsurnya - Gramedia Literasi*. Gramedia Literasi.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-internal/>

suhayati, E (2021). *Auditing Teori dan Praktik Dasar Pemeriksaan Akuntan Publik*.
Rekayasa Sains

INFORMASI TAMBAHAN

Berikut adalah daftar pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden, bagan pertanyaan ini sudah disesuaikan dengan kerangka kerja COSO.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Variabel	Dimensi	Indikator	
1.	Lingkungan Pengendalian	1.1 Integritas dan Nilai Etika	1.1.1 Ada atau tidaknya kebijakan/ <i>Standard Operating Procedure</i> (K/SOP) tentang aturan perilaku	
			1.1.2 Belum atau sudahnya dikomunikasikan kebijakan mengenai aturan perilaku kepada seluruh pegawai	
			1.1.3 Ada atau tidaknya dokumen pengenaan sanksi disiplin yang tepat terhadap pelanggaran aturan perilaku	
			1.1.4 Ada atau tidaknya dokumen evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku	
		1.2 Komitmen terhadap kompetensi	1.1.5 Adanya program aplikasi seperti <i>Whistleblower system</i> sebagai saluran pengaduan sekaligus pemantauan penerapan aturan perilaku	
			1.2.1 Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan	
			1.2.2 Sudah/belumnya disosialisasikan kebijakan mengenai standar kompetensi untuk seluruh posisi jabatan dalam entitas kementerian	
			1.2.3 Ada atau tidaknya dokumen atas pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi teknis/ manajerial pegawai dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, sesuai dengan kebijakan/ prosedur yang berlaku	
			1.2.4 Ada atau tidaknya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan kebijakan/ prosedur tentang standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan	
			1.2.5 Ada atau tidaknya sistem/ database kopetensi pegawai sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan penempatan/ penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan	
			1.3 Struktur Organisasi sesuai kebutuhan	1.3.1 Ada atau tidaknya dokumen struktur organisasi dan tata laksana yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
				1.3.2 Ada atau tidaknya dokumen sosialisasi mengenai struktur organisasi beserta tata laksana kepada seluruh level pimpinan unit entitas dan pegawai yang berkepentingan
1.3.3 Ada atau tidaknya dokumen kebijakan/ prosedur yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam entitas				
1.3.4 Ada atau tidaknya program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan				



			tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya
	1.4 Peran aparat pengawasan intern perusahaan yang efektif		1.4.1 Ada atau tidaknya satuan pengawasan intern (inspektorat/inspektorat jenderal) yang memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern. 1.4.2 Ada atau tidaknya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern 1.4.3 Ada atau tidaknya: 1. Laporan hasil audit intern 2. Surat atensi dari Inspektorat/Itjen kepada pimpinan unit organisasi/unit kerja. 3. Ada atau tidaknya bukti tindak lanjut terhadap surat atensi dari Inspektorat/Itjen. 1.4.4 Ada atau tidaknya penilaian internal dan eksternal dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai 1.4.5 Ada atau tidaknya keberadaan aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
2.	Penilaian Risiko	2.1 Identifikasi Risiko	2.1.1 Ada atau tidaknya pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pengaturan penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan. 2.1.2 Ada atau tidaknya dokumen/bukti bahwa pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. 2.1.3 Ada atau tidaknya dokumen berupa Daftar Risiko atas kegiatan utama. 2.1.4 Ada atau tidaknya evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko/kebijakan penilaian risiko dan daftar risiko 2.1.5 Ada atau tidaknya aplikasi untuk memantau pemutakhiran daftar risiko.
		2.2 Analisis Risiko	2.2.1 Ada atau tidaknya pedoman penilaian risiko (analisis risiko) termasuk pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan. 2.2.2 Ada atau tidaknya dokumen/bukti bahwa pedoman/ kebijakan penilaian risiko (analisis risiko) telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai (misalnya berupa Surat Edaran (SE), memo, Nota Dinas (ND) dari Pimpinan.



			2.2.3 Adanya rencana tindak pengendalian (RTP)/ rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit organisasi
			2.2.4 Adanya evaluasi terhadap pedoman/ kebijakan penilaian risiko (analisis risiko) rencana tindak pengendalian/ rencana penanganan risiko
			2.2.5 Adanya aplikasi komputer/ web untuk memantau pemutakhiran RTP/ rencana penanganan risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders
3.	Kegiatan Pengendalian	3.1 Review Kinerja	3.1.1 Ada atau tidaknya dokumen penetapan kinerja organisasi dan unit organisasi/ unit kerja tahunan dan atau triwulanan
			3.1.2 Ada atau tidaknya laporan kinerja triwulan organisasi/ unit org/ unit kerja. Pastikan bahwa laporan kinerja tersebut mengukur pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK/ Tapkin
			3.1.3 Ada atau tidaknya laporan evaluasi sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi atas kinerja
			3.1.4 Ada atau tidaknya program aplikasi komputer yang online, yang memantau pelaksanaan kinerja organisasi/ unit org/ unit kerja
		3.2 Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3.2.1 Ada atau tidaknya kebijakan/ aturan/ SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting,
			3.2.2 Adanya pengomunikasian Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
			3.2.3 Adanya bukti penerapan kebijakan/aturan/ SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
			3.2.4 Adanya bukti evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kebijakan/aturan/ SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.
			3.2.5 Adanya Program Aplikasi komputer yang online, yang memantau pelaksanaan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
4.	Informasi dan Komunikasi	4.1 Informasi	4.1.1 Ada atau tidaknya spesifikasi kebutuhan Informasi SPI ditetapkan secara formal
			4.1.2 Apakah Kebijakan/prosedur atau pedoman infokom/ kehumasan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/ pegawai yang berkepentingan



		4.1.3 Ada atau tidaknya Mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci dan sesuai untuk semua tingkatan Pimpinan
		4.1.4 Ada atau tidaknya Menggunakan sistem informasi operasional dan keuangan yang dapat mendukung program dan kegiatan
		4.1.5 Ada atau tidaknya kesesuaian program kegiatan dengan peraturan perundang-undangan
	4.2 Komunikasi yang efektif	4.2.1 Ada atau tidaknya notulen, kick off, pakta integritas, pencaanangan arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern.
		4.2.2 Ada atau tidaknya kebijakan/prosedur atau pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/ pegawai yang berkepentingan
		4.2.3 Ada atau tidaknya pimpinan organisasi telah menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi, baik untuk internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan
		4.2.4 Ada atau tidaknya pimpinan organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/ SOP/pedoman tersebut secara berkala dan terdokumentasi
		4.2.5 Ada atau tidaknya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Forum pemutakhiran data.
5.	Pemantauan Evaluasi Terpisah	Adanya kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit
		Adanya kegiatan sosialisasi dan media untuk komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak lanjut temuan audit
		Apakah telah melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah dengan melibatkan manajemen dan pegawai terkait yang berkompeten
		Apakah Adanya kegiatan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses penyelesaian audit.